



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Profil Pengelolaan Hibah Pemerintah Pusat Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 999.02

Edisi Tahun 2024



Ringkasan Umum



Pendapatan hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.



Belanja hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada Pemerintah Daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.



Dibandingkan dengan realisasi pendapatan hibah tahun 2023, realisasi pendapatan hibah tahun 2024 mengalami **peningkatan sebesar 64,39%**, yaitu sebesar **Rp17,32 triliun**.



Dibandingkan dengan realisasi belanja hibah tahun 2023, realisasi belanja hibah tahun 2024 mengalami **peningkatan sebesar Rp59,29 miliar atau 27,06%**.



Selama periode tahun 2024, realisasi pendapatan hibah terkait Pilkada Serentak sebesar **Rp25,13 triliun**.

Landasan Hukum

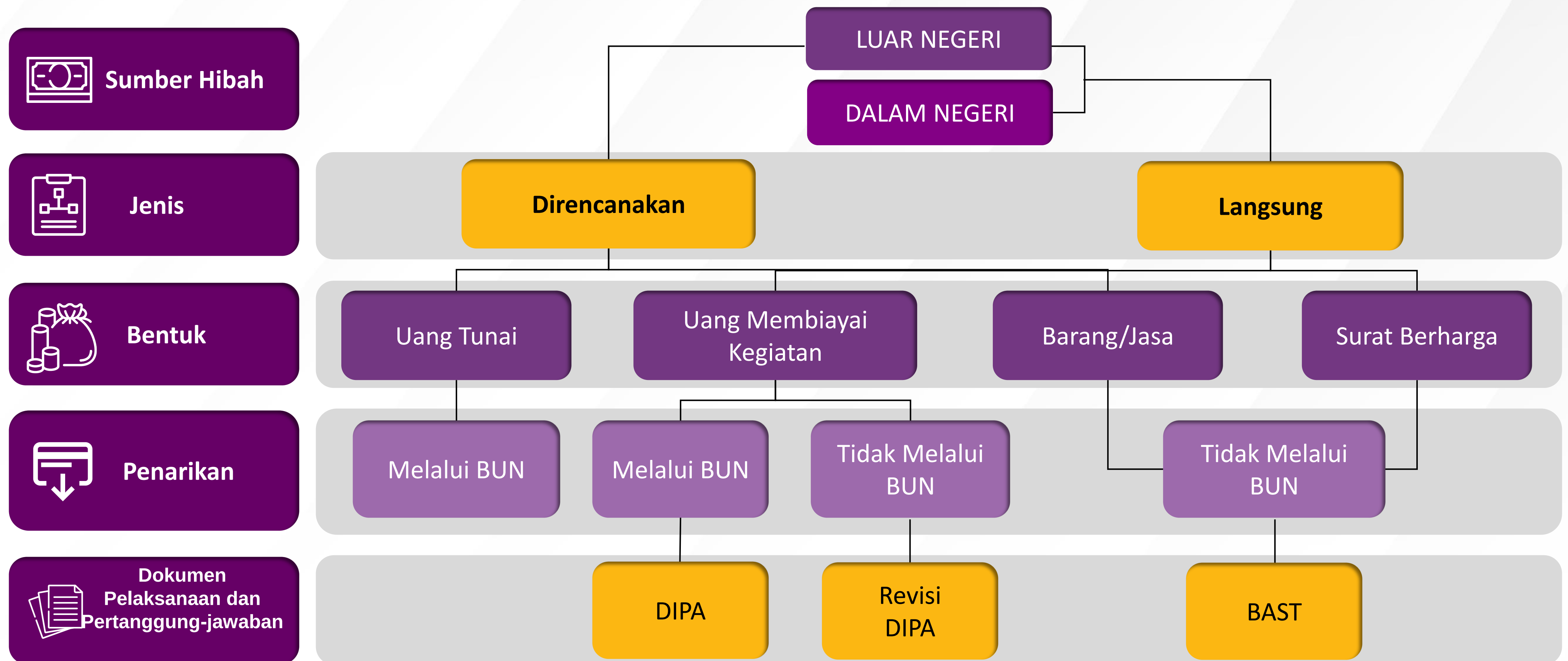
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Pendapatan Hibah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.08/2014 tentang Pelaksanaan Belanja Hibah ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
16. Peraturan Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor 11/PB/2014 dan 1/PU/2014 perubahan atas Peraturan Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor 10/PB/2010 dan 01/PU/2010 tentang Mekanisme Penggunaan Dokumen Sumber, Pencatatan, dan Rekonsiliasi Realisasi Penarikan dan Pembayaran Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
17. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-876/PB/2020 tentang Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu.
18. Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-129/PB/2025 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara (UAP BUN) dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu Bendahara Umum Negara (UAKP BUN) Tahun 2024 *Audited*.

Daftar Singkatan

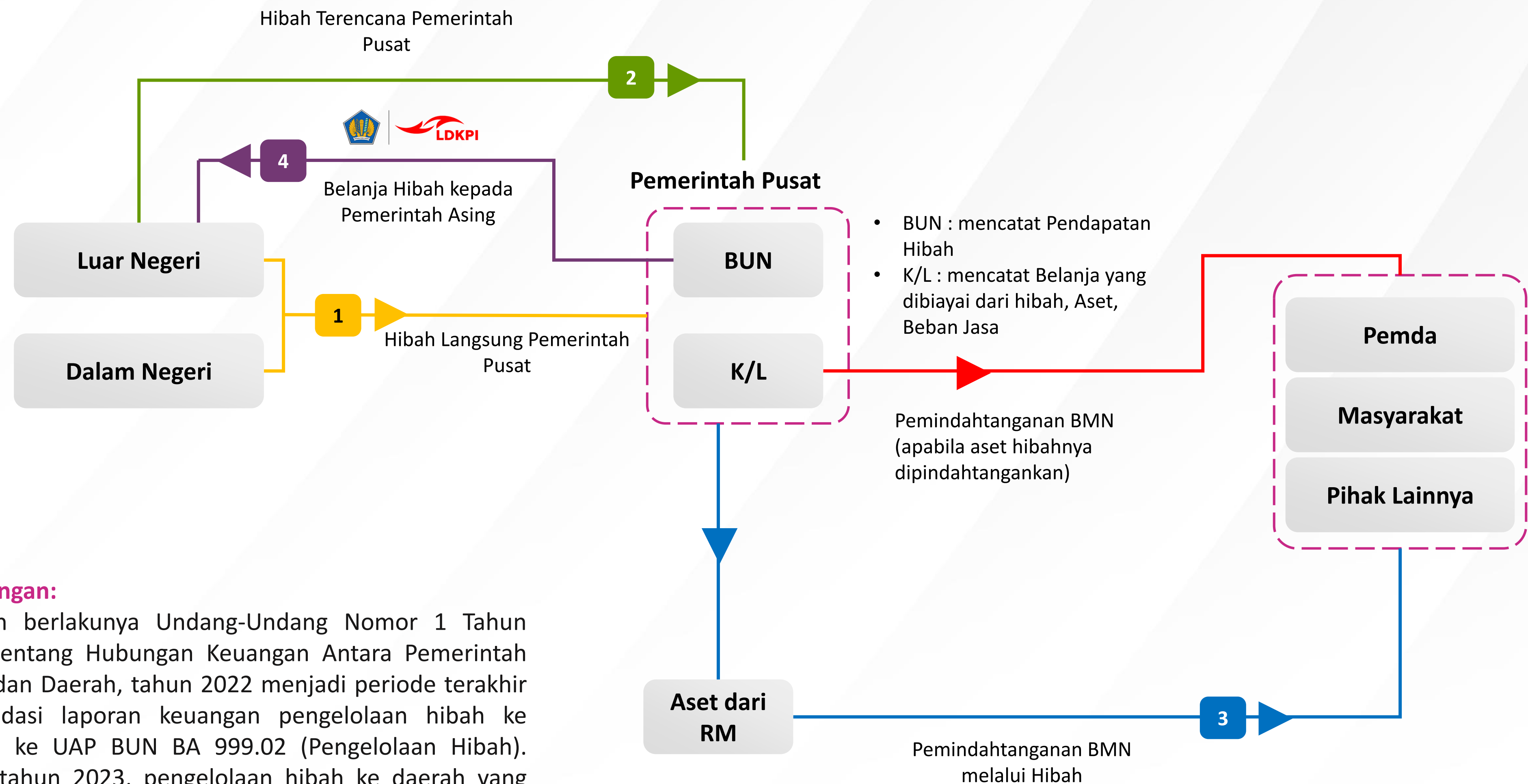
No	Singkatan	Uraian
1.	BA	Bagian Anggaran
2.	BAST	Berita Acara Serah Terima
3.	BMN	Barang Milik Negara
4.	BUN	Bendahara Umum Negara
5.	DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
6.	DP	Direct Payment
7.	DRKH	Daftar Rencana Kegiatan Hibah
8.	KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
9.	KUN	Kas Umum Negara
10.	K/L	Kementerian Negara/Lembaga
11.	MPHLBJS	Memo Pencatatan Hibah Langsung – Barang/Jasa/Surat Berharga
12.	LC	Letter of Credit
13.	LK	Laporan Keuangan
14.	LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
15.	NoD	Notice of Disbursement
16.	NPH	Naskah Perjanjian Hibah
17.	Reksus	Rekening Khusus
18.	RM	Rupiah Murni
19.	SP2HL	Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung
20.	SP3HL	Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung
21.	SP3HLBJS	Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
22.	SP4HL	Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung
23.	SPAN	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
24.	SPHL	Surat Pengesahan Hibah Langsung
25.	SPTMHL	Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung
26.	UAP	Unit Akuntansi Pembantu
27.	WA	Withdrawal Application

Variasi Pelaksanaan Hibah

Realisasi pendapatan hibah yang mekanisme penarikan hibahnya melalui kuasa BUN dan tidak melalui kuasa BUN (kas dan barang/jasa/surat berharga).



Skema Hubungan Entitas Pengelola Hibah



Keterangan:

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, tahun 2022 menjadi periode terakhir konsolidasi laporan keuangan pengelolaan hibah ke daerah ke UAP BUN BA 999.02 (Pengelolaan Hibah). Mulai tahun 2023, pengelolaan hibah ke daerah yang semula menjadi bagian dari BA 999.02 dialihkan ke BA 999.05 (Transfer ke Daerah).



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

djppr

Pendapatan Hibah

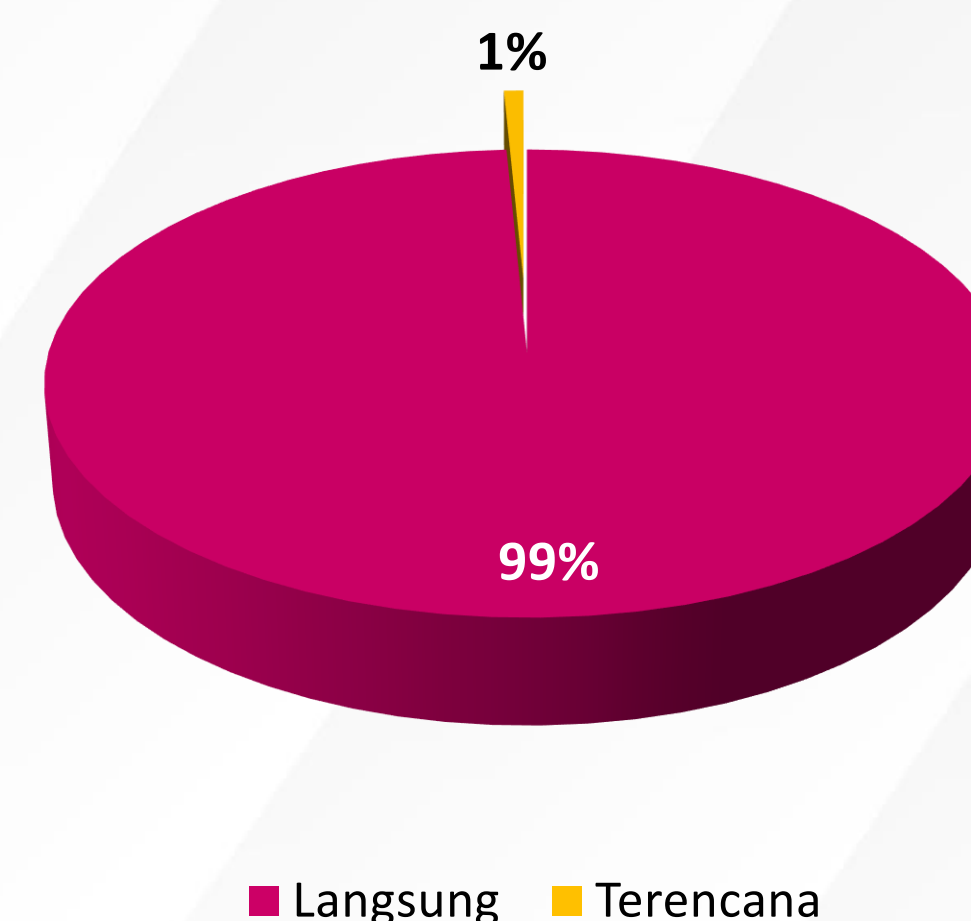


Daftar Register Aktif Per Tahun 2024

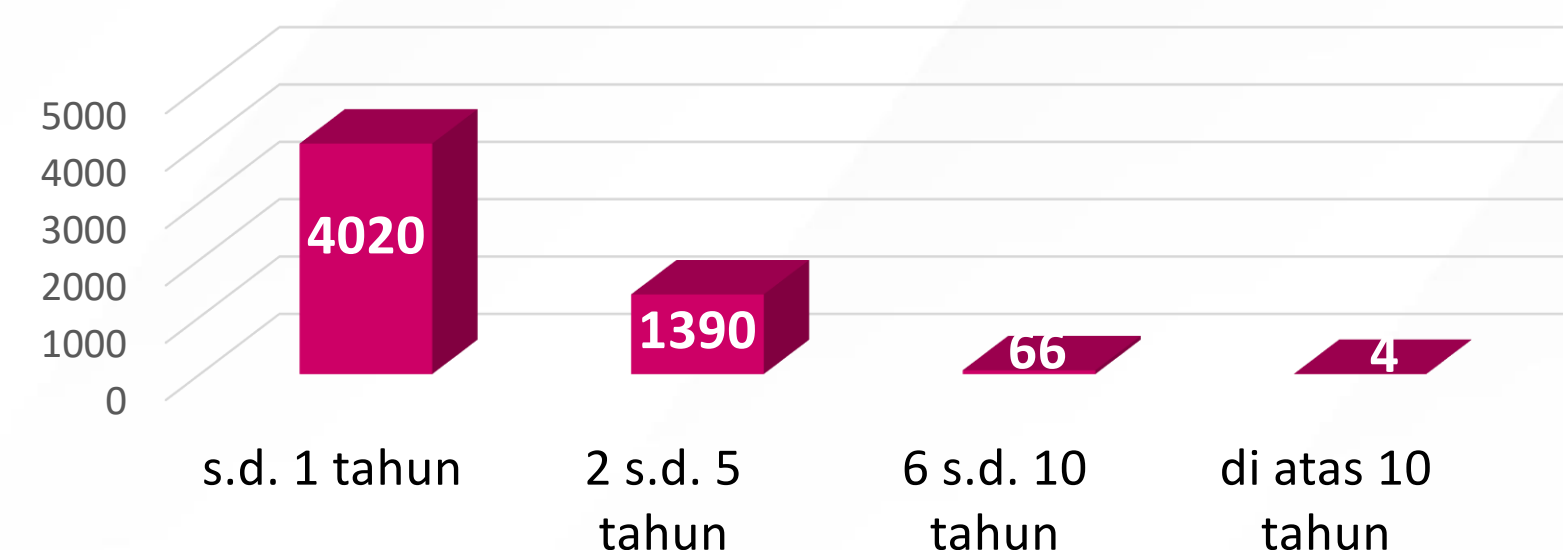
Per Jenis & Pemberi Hibah

NO	JENIS HIBAH	NEGARA PEMBERI HIBAH	JML REGISTER
1	LANGSUNG	INDONESIA	4,995
2		INTERNATIONAL ORGANIZATION	177
3		JAPAN	63
4		GERMANY	44
5		UNITED STATES	35
6		KOREA, REPUBLIC OF	32
7		AUSTRALIA	27
8		UNITED KINGDOM	13
9		A D B	8
10		SWITZERLAND	6
11		LAINNYA	38
LANGSUNG Total			5,438
12	TERENCANA	I B R D	14
13		GERMANY	10
14		INTERNATIONAL ORGANIZATION	7
15		I F A D	3
16		AUSTRALIA	2
17		FRANCE	2
18		A D B	2
19		I D B	1
20		UNITED STATES	1
TERENCANA Total			42
TOTAL			5,480

Persentase Jumlah Register per Jenis Hibah



Jumlah Register Berdasarkan Periode Hibah



Catatan

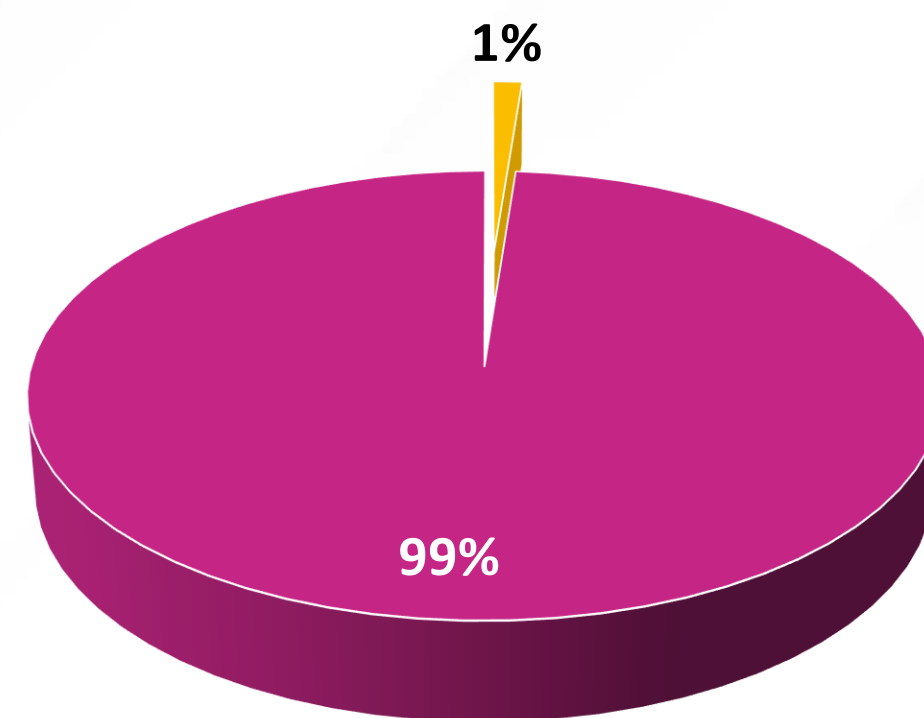
- Sumber : Data register SEHATI, diolah
- Register aktif dengan periode *closing* hibah 2024 ke atas

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2024

KETERANGAN		NILAI	KETERANGAN		NILAI	TOTAL
Dalam Negeri		35.496.411.343.168	Luar Negeri		8.719.909.695.942	44.216.321.039.110
-	Melalui Kuasa BUN (Terencana)	-	-	Melalui Kuasa BUN (Terencana)	540.471.344.113	540.471.344.113
-	Tidak Melalui Kuasa BUN (Langsung):	35.496.411.343.168	-	Tidak Melalui Kuasa BUN (Langsung):	8.179.438.351.829	43.675.849.694.997
	Uang (Kas)	32.247.196.309.907		Uang (Kas)	1.599.696.061.736	33.846.892.371.643
	Barang	3.202.856.466.557		Barang	1.667.450.649.849	4.870.307.116.406
	Jasa	46.358.566.704		Jasa	4.912.291.640.244	4.958.650.206.948

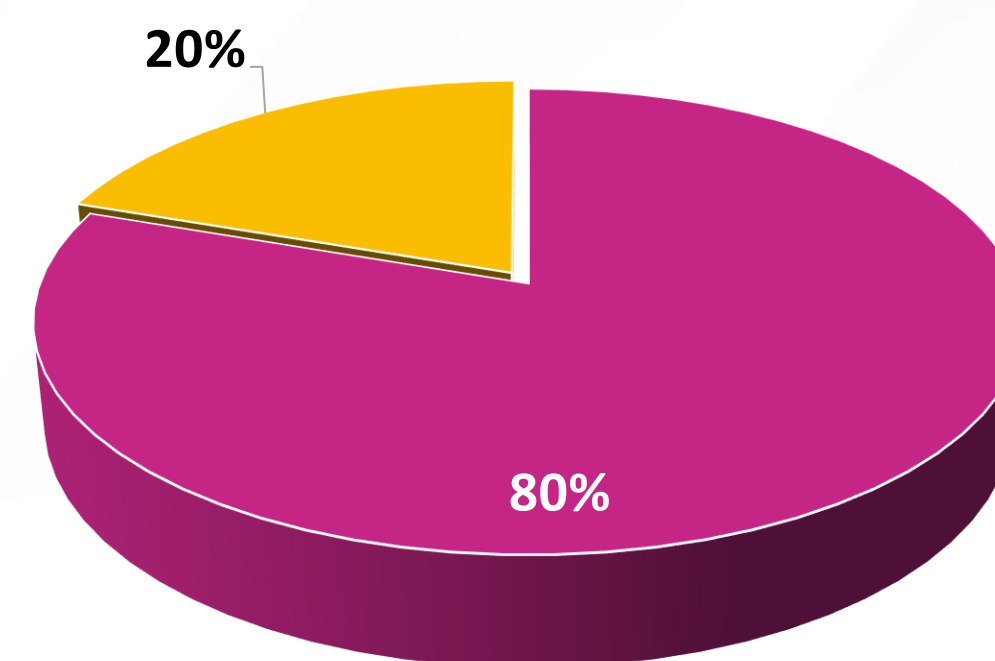
Sumber: Data LK BA Tahun 2024 Audited berdasarkan SPAN, diolah

Berdasarkan Mekanisme Penarikan



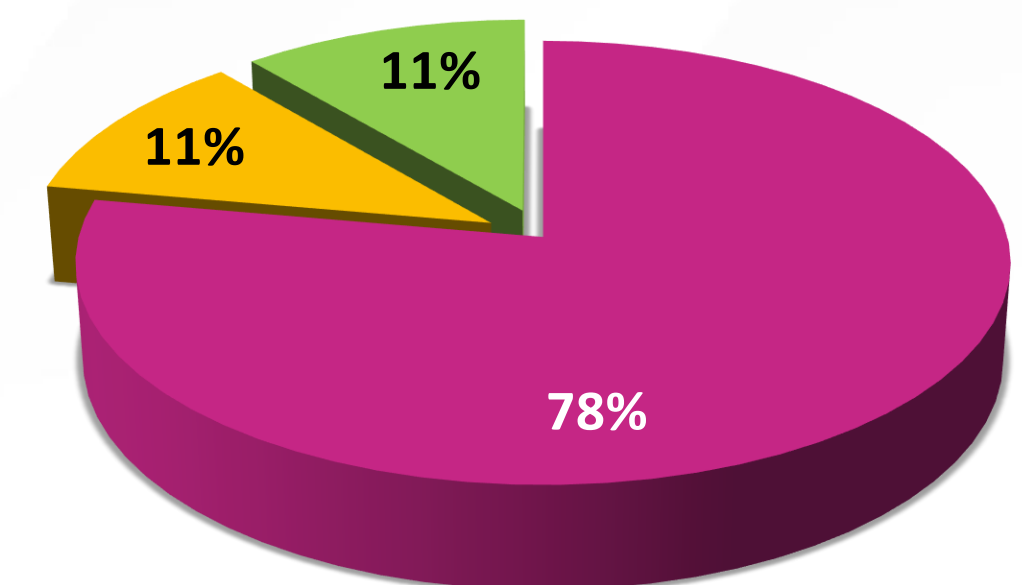
■ Melalui Kuasa BUN
■ Tidak Melalui Kuasa BUN

Berdasarkan Sumber



■ Dalam Negeri ■ Luar Negeri

Berdasarkan Bentuk



■ Kas ■ Barang ■ Jasa

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2024

Per Kementerian/Lembaga

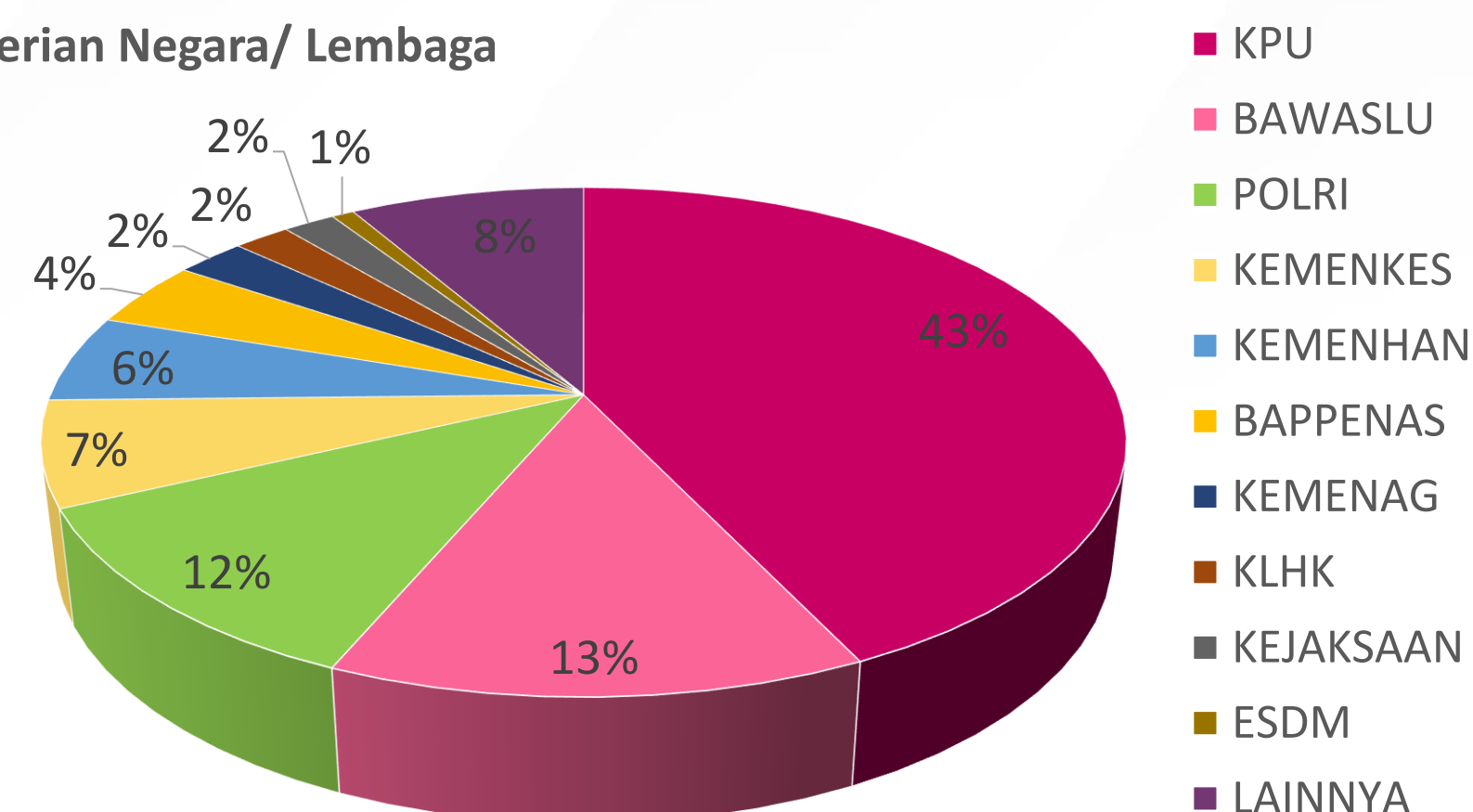
No	Kementerian/Lembaga	Terencana	Langsung			Total
		Kas	Kas	Barang	Jasa	
1	KPU	-	18.941.334.567.122	27.155.355.195	-	18.968.489.922.317
2	BAWASLU	-	5.961.871.588.779	4.894.882.574	-	5.966.766.471.353
3	POLRI	-	4.181.259.100.776	935.844.953.626	-	5.117.104.054.402
4	KEMENKES	-	1.224.026.158.179	465.005.593.996	1.273.625.138.570	2.962.656.890.745
5	KEMENHAN	-	1.455.573.326.093	1.007.123.055.696	-	2.462.696.381.789
6	BAPPENAS	167.304.942.679	106.734.467.106	1.781.586.192	1.599.152.451.947	1.874.973.447.924
7	KEMENAG	-	1.044.255.836.416	54.891.459.060	-	1.099.147.295.476
8	KLHK	230.848.849.881	341.806.246.783	37.168.869.790	280.965.198.213	890.789.164.667
9	KEJAKSAAN	-	163.058.078.349	654.492.676.397	5.196.069.117	822.746.823.863
10	ESDM	(268.120.357)	14.725.080.106	19.685.585.636	318.678.311.583	352.820.856.968
11	LAINNYA	142.585.671.910	412.247.921.934	1.662.263.098.244	1.481.033.037.518	3.698.129.729.606
TOTAL		540.471.344.113	33.846.892.371.643	4.870.307.116.406	4.958.650.206.948	44.216.321.039.110

Sumber: Data LK BA Tahun 2024 Audited berdasarkan SPAN, diolah

Penerima hibah terbesar pada tahun 2024:

“Penerima hibah dalam bentuk kas terbesar adalah KPU, dalam bentuk barang terbesar adalah Kementerian Pertahanan, dan dalam bentuk jasa terbesar adalah Bappenas.

Persentase Realisasi Penerimaan Hibah
Per Kementerian Negara/ Lembaga



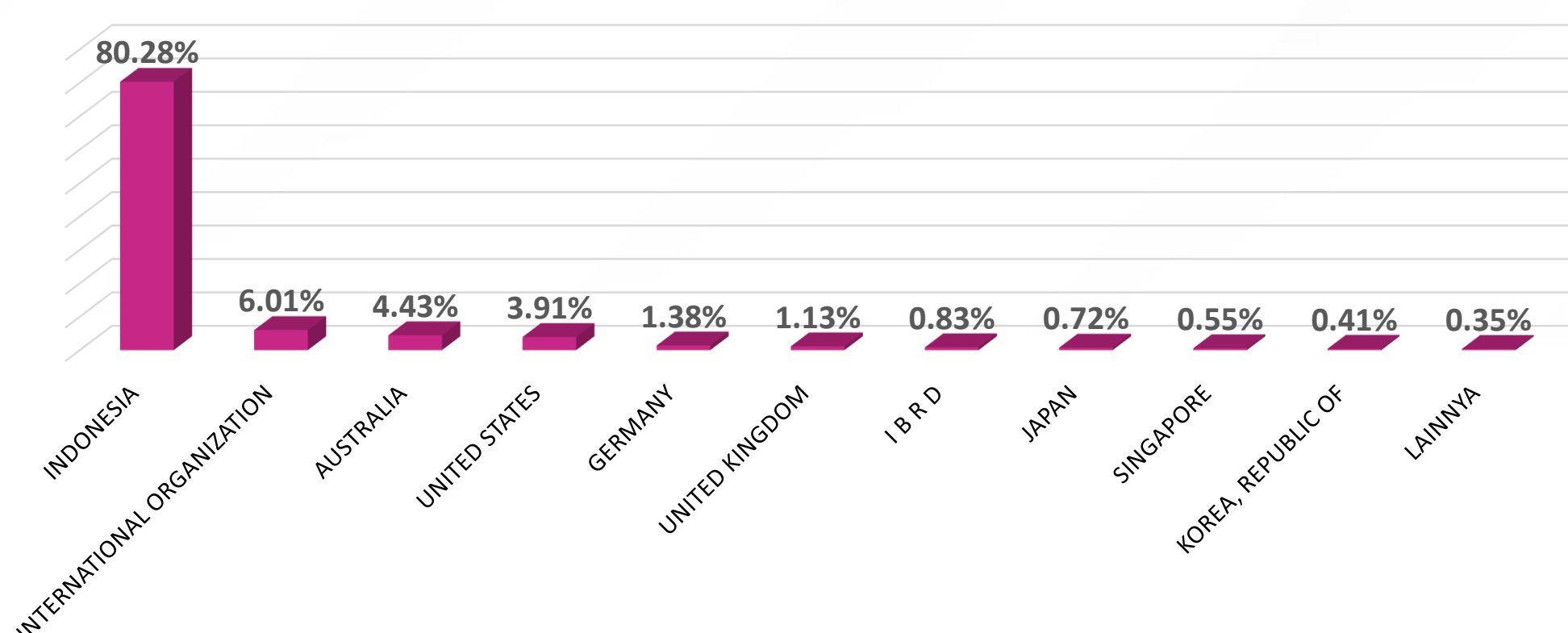
Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2024

Per Negara Pemberi Hibah

NO.	NEGARA DONOR	TERENCANA	LANGSUNG			TOTAL
		KAS	KAS	BARANG	JASA	
1	INDONESIA		32.247.196.309.907	3.202.856.466.557	46.358.566.704	35.496.411.343.168
2	INTERNATIONAL ORGANIZATION		1.435.113.242.030	596.911.950.332	625.062.855.507	2.657.088.047.869
3	AUSTRALIA		5.389.338.809	22.543.584.472	1.931.578.542.360	1.959.511.465.641
4	UNITED STATES		115.113.852.674	129.846.349.778	1.484.522.332.948	1.729.482.535.400
5	GERMANY	164.145.995.209		11.524.036.936	436.306.494.708	611.976.526.853
6	UNITED KINGDOM		470.912.235	329.610.233.650	168.739.754.250	498.820.900.135
7	I B R D	367.896.637.059				367.896.637.059
8	JAPAN		4.923.815.041	230.871.423.020	83.521.772.943	319.317.011.004
9	SINGAPORE			239.344.481.647	2.469.083.318	241.813.564.965
10	KOREA, REPUBLIC OF		11.169.840.899	102.193.270.654	65.976.932.942	179.340.044.495
11	LAINNYA	8.428.711.845	27.515.060.048	4.605.319.360	114.113.871.268	154.662.962.521
	TOTAL	540.471.344.113	33.846.892.371.643	4.870.307.116.406	4.958.650.206.948	44.216.321.039.110

*hibah dalam negeri antara lain bersumber dari lembaga keuangan dan non-keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan berkegiatan di wilayah Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan

Persentase Realisasi Penerimaan Hibah Per Negara Pemberi Hibah



Pemberi hibah terbesar pada Tahun 2024:

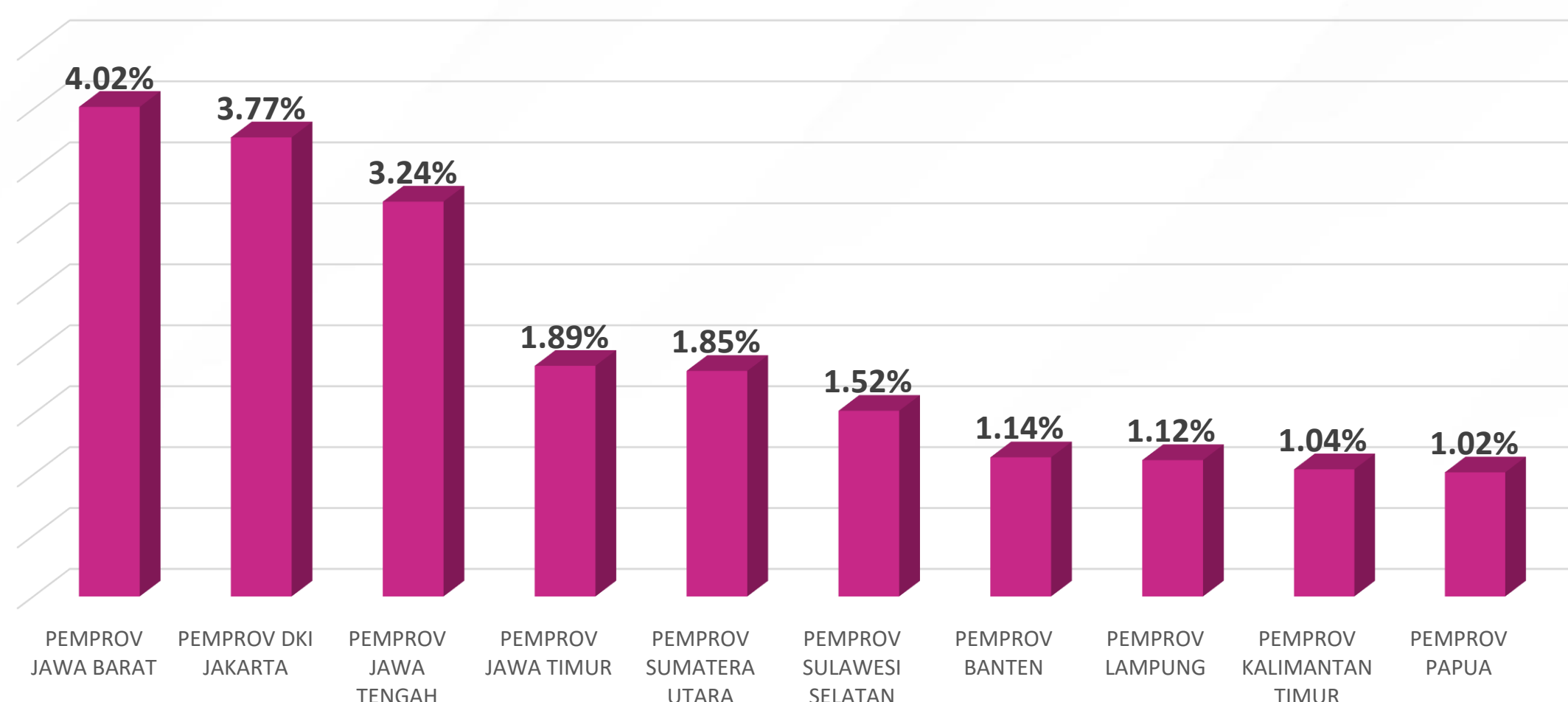
“Pemberi hibah kas dan barang terbesar berasal dari dalam negeri, sedangkan untuk pemberi hibah jasa terbesar berasal dari Australia.

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2024

Per Pemerintah Daerah Pemberi Hibah

NO	PEMBERI HIBAH	REALISASI PENDAPATAN
1	PEMPROV JAWA BARAT	1.388.265.208.870,00
2	PEMPROV DKI JAKARTA	1.301.833.794.425,00
3	PEMPROV JAWA TENGAH	1.119.985.316.868,00
4	PEMPROV JAWA TIMUR	654.345.286.096,00
5	PEMPROV SUMATERA UTARA	639.985.231.463,00
6	PEMPROV SULAWESI SELATAN	526.742.921.497,00
7	PEMPROV BANTEN	394.679.209.875,00
8	PEMPROV LAMPUNG	386.750.829.200,00
9	PEMPROV KALIMANTAN TIMUR	360.651.511.817,00
10	PEMPROV PAPUA	352.030.434.000,00
11	LAINNYA (540 PEMDA)	27.442.442.854.416,00
TOTAL		34.567.712.598.527,00

Persentase Realisasi Penerimaan Hibah Per Pemerintah Daerah Pemberi Hibah



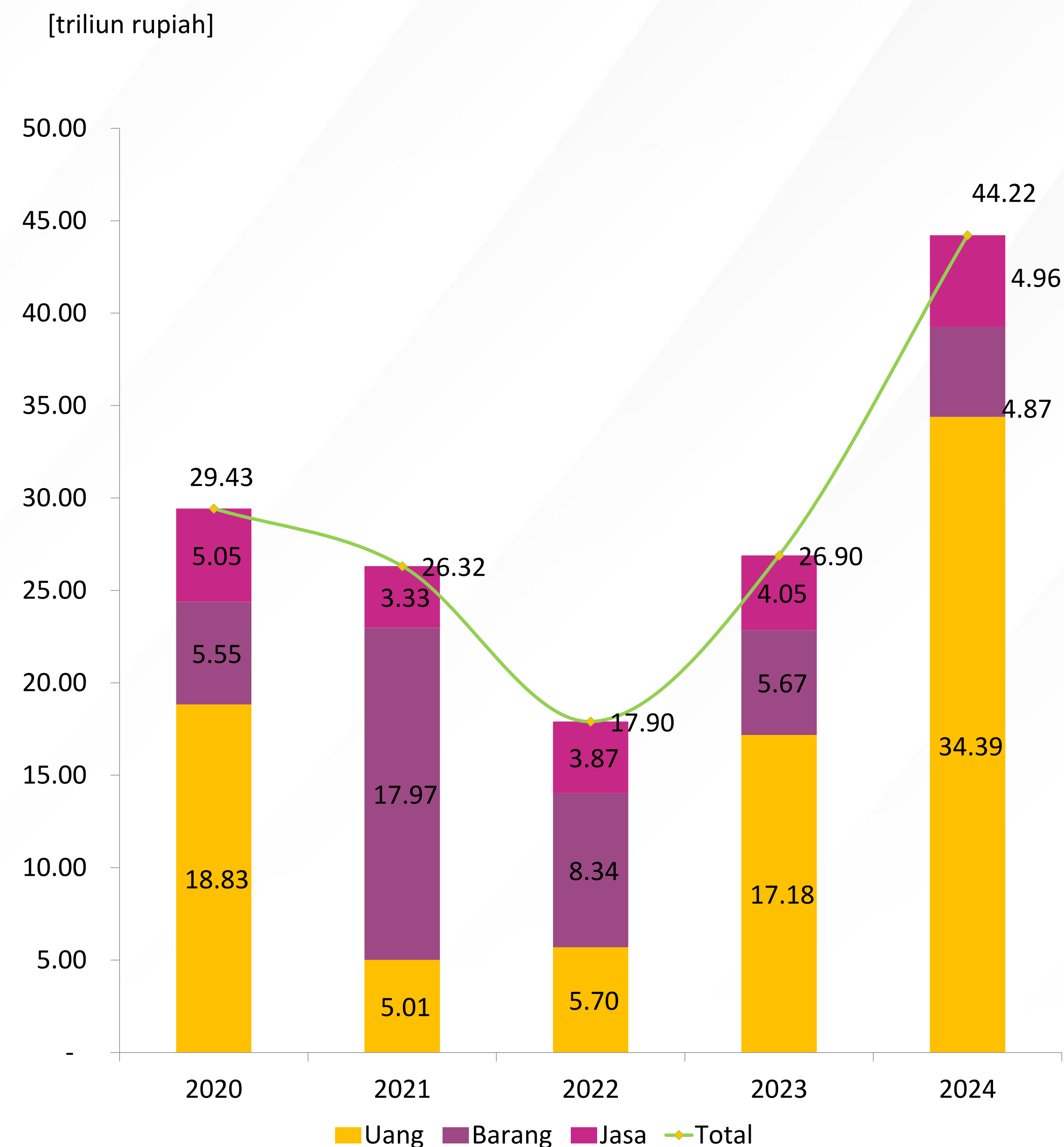
Pemerintah Daerah Pemberi hibah terbesar pada Tahun 2024:



Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Perkembangan Pendapatan Hibah

Berdasarkan Bentuknya



Bentuk Hibah	2020	2021	2022	2023	2024
Uang (kas)	18,83	5,01	5,70	17,18	34,39
Barang	5,55	17,97	8,34	5,67	4,87
Jasa	5,05	3,33	3,87	4,05	4,96
Total	29,43	26,32	17,90	26,90	44,22

Sumber Data LK BA Tahun 2024 Audited berdasarkan SPAN, diolah

Pendapatan hibah terbesar pada Tahun 2024:



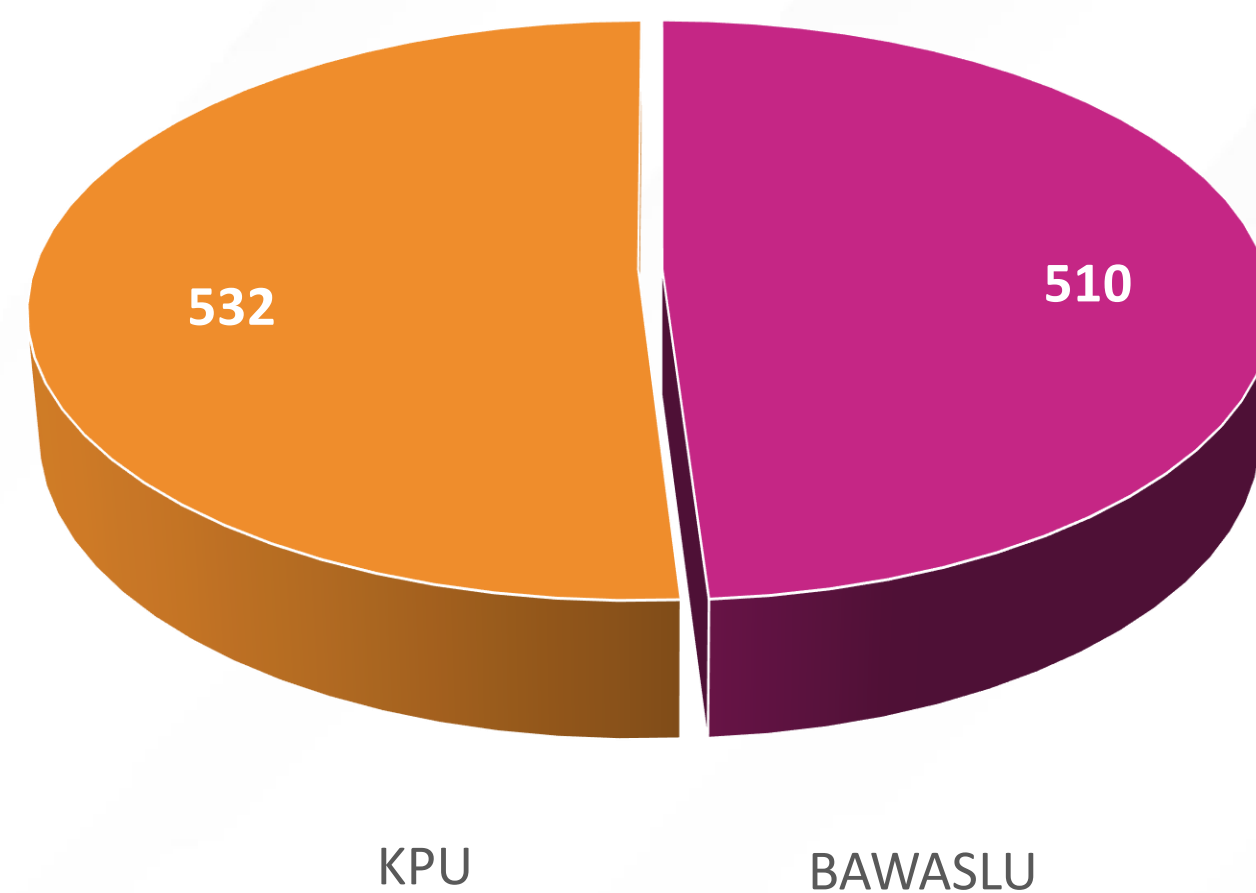
Pendapatan hibah terbesar pada Tahun 2024 adalah dalam bentuk uang (kas)

Realisasi Pendapatan Hibah Pilkada Serentak

Realisasi pendapatan hibah Pilkada Serentak:

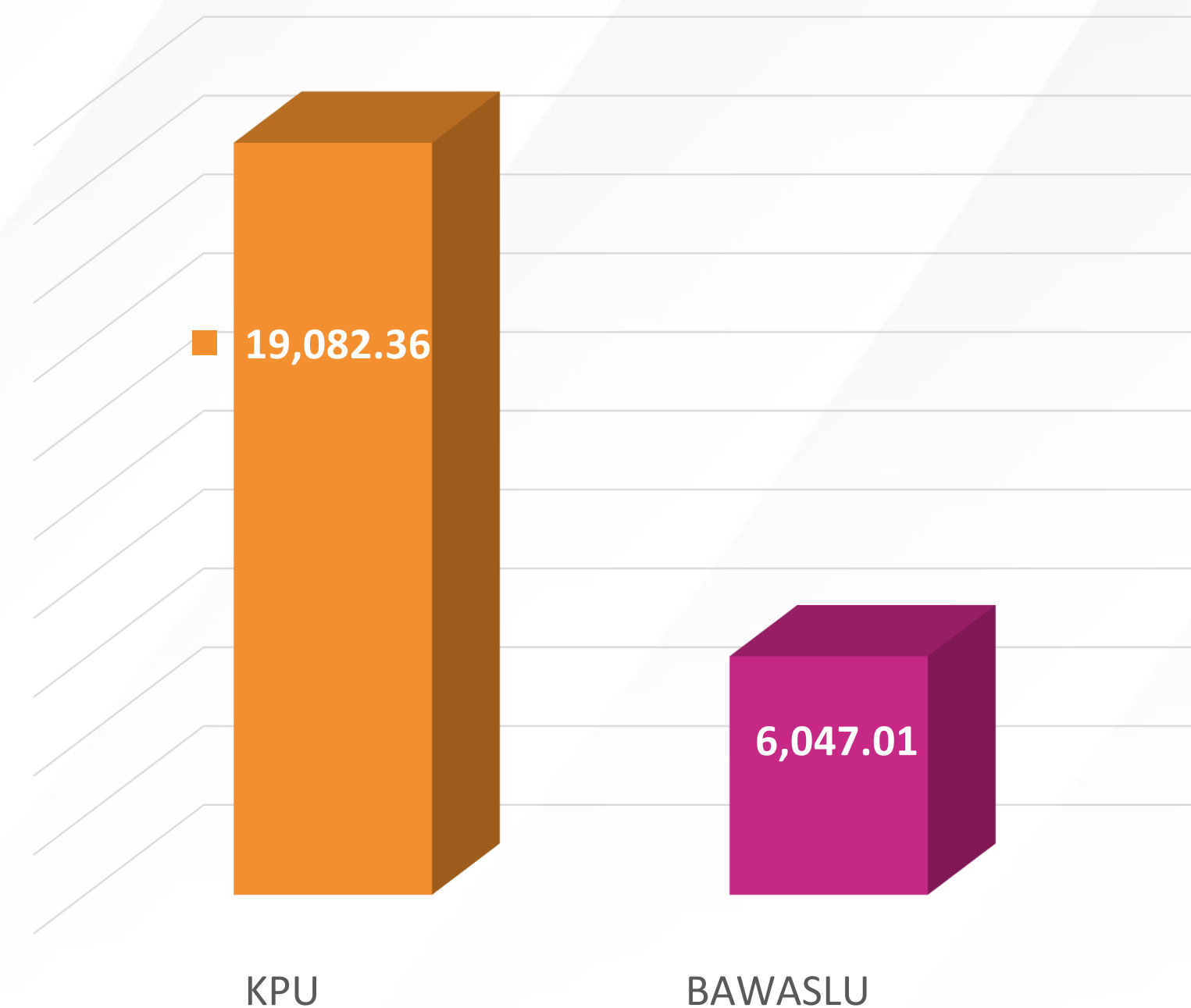
Realisasi pendapatan hibah terkait Pilkada Serentak pada Tahun 2024 sebesar Rp25.129,37 triliun, yaitu 73,08% dari total realisasi pendapatan hibah (LRA) Tahun 2024 sebesar Rp34.387,36 triliun.

Jumlah Register



[miliar rupiah]

Realisasi Pendapatan Hibah



Sumber: Data LK BA Tahun 2024 Audited berdasarkan SPAN, diolah



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

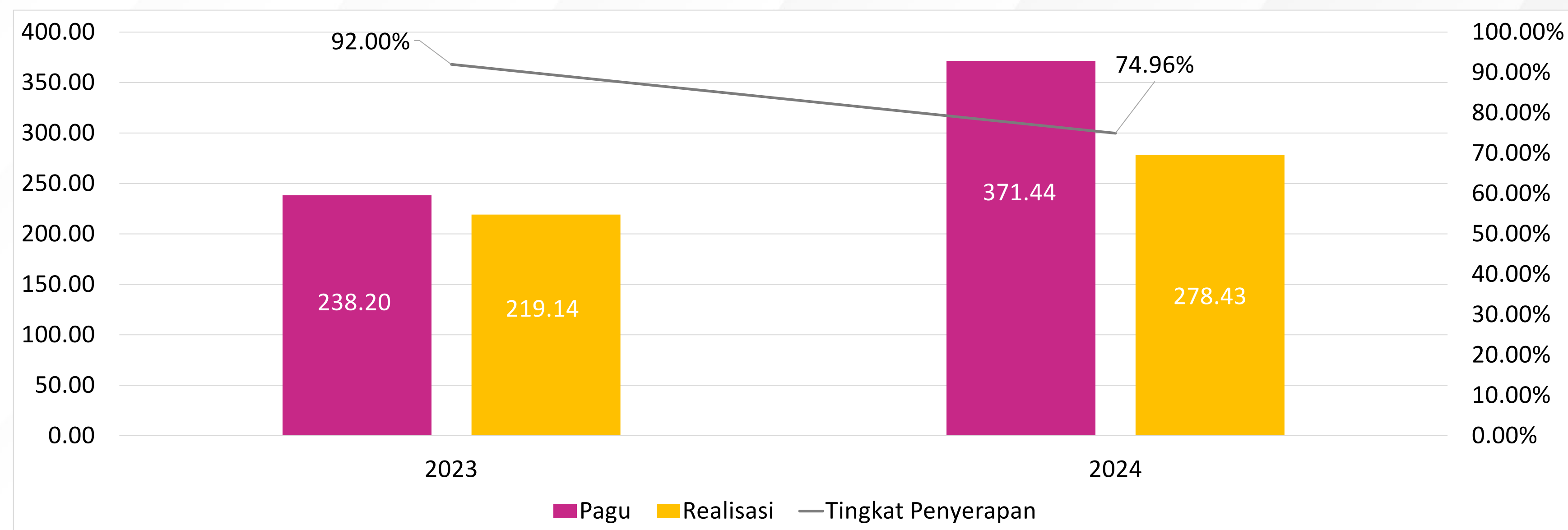
djppr

Belanja Hibah



Perbandingan Realisasi Belanja Hibah Luar Negeri Tahun 2023 dan Tahun 2024

[miliar rupiah]



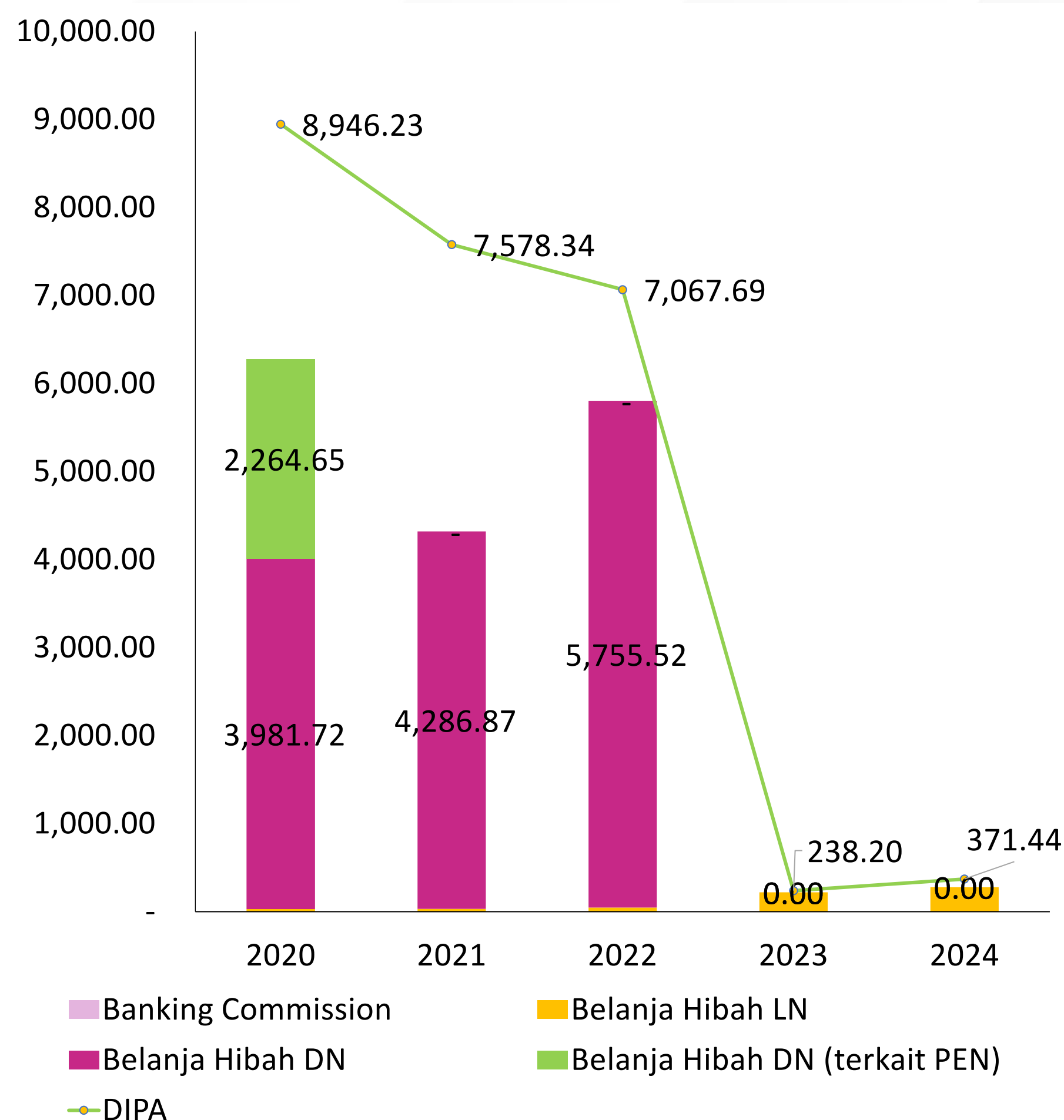
Perbandingan realisasi belanja hibah luar negeri :

No.	Jenis Belanja Hibah	2023			2024		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Hibah - Banking Commission	151.000.000	101.163.777	67,00%	399.771.000	261.734.387	65,47%
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Asing / Lembaga Asing	238.046.041.000	219.039.555.000	92,02%	371.045.105.000	278.169.204.566	74,97%
Total	Total	238.197.041.000	219.140.718.777	92,00%	371.444.876.000	278.430.938.953	74,96%

Sumber: Data LK BA Tahun 2024 Audited berdasarkan SPAN, diolah

Perkembangan Realisasi Belanja Hibah

[miliar rupiah]



[miliar rupiah]

KETERANGAN	2020	2021	2022	2023	2024
DIPA	8,946.23	7,578.34	7,067.69	238.20	371.44
Banking Commission	0.13	0.10	0.25	0.10	0.26
Belanja Hibah LN*	29.41	32.02	47.51	219.04	278.17
Belanja Hibah DN**	3,981.72	4,286.87	5,755.52	-	-
Belanja Hibah DN (terkait PEN)***	2,264.65	-	-	-	-
TOTAL BELANJA	6,275.91	4,319.00	5,803.27	219.14	278.43

*) Dilakukan oleh BLU LDKPI

**) Mulai tahun 2023 dialihkan ke BA 999.05 (Transfer ke Daerah)

***) Hanya dilakukan di tahun 2020 dalam periode Covid

Sumber: Data LK BA Tahun 2024 Audited berdasarkan SPAN, diolah

Perkembangan realisasi belanja hibah pada Tahun 2024:



Perkembangan realisasi belanja hibah pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2023 karena peningkatan realisasi hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing yang disahkan pada BA BUN 999.02



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

djppr

Opini



Opini BPK

	2008	2009-2011	2012	2013-2015	2016-2024
LK BA	Disclaimer	WDP	WTP-DPP	Opini di LK BUN (tidak ada temuan yang pengaruhi opini LKBUN)*	
LKBUN	Disclaimer	WDP	WTP-DPP	WDP	WTP
LKPP	Disclaimer	WDP	WDP	WDP	WTP

* mulai tahun 2013 LK BA tidak diberi opini tersendiri, tetapi digabung dengan opini LKBUN konsolidasian

Catatan:

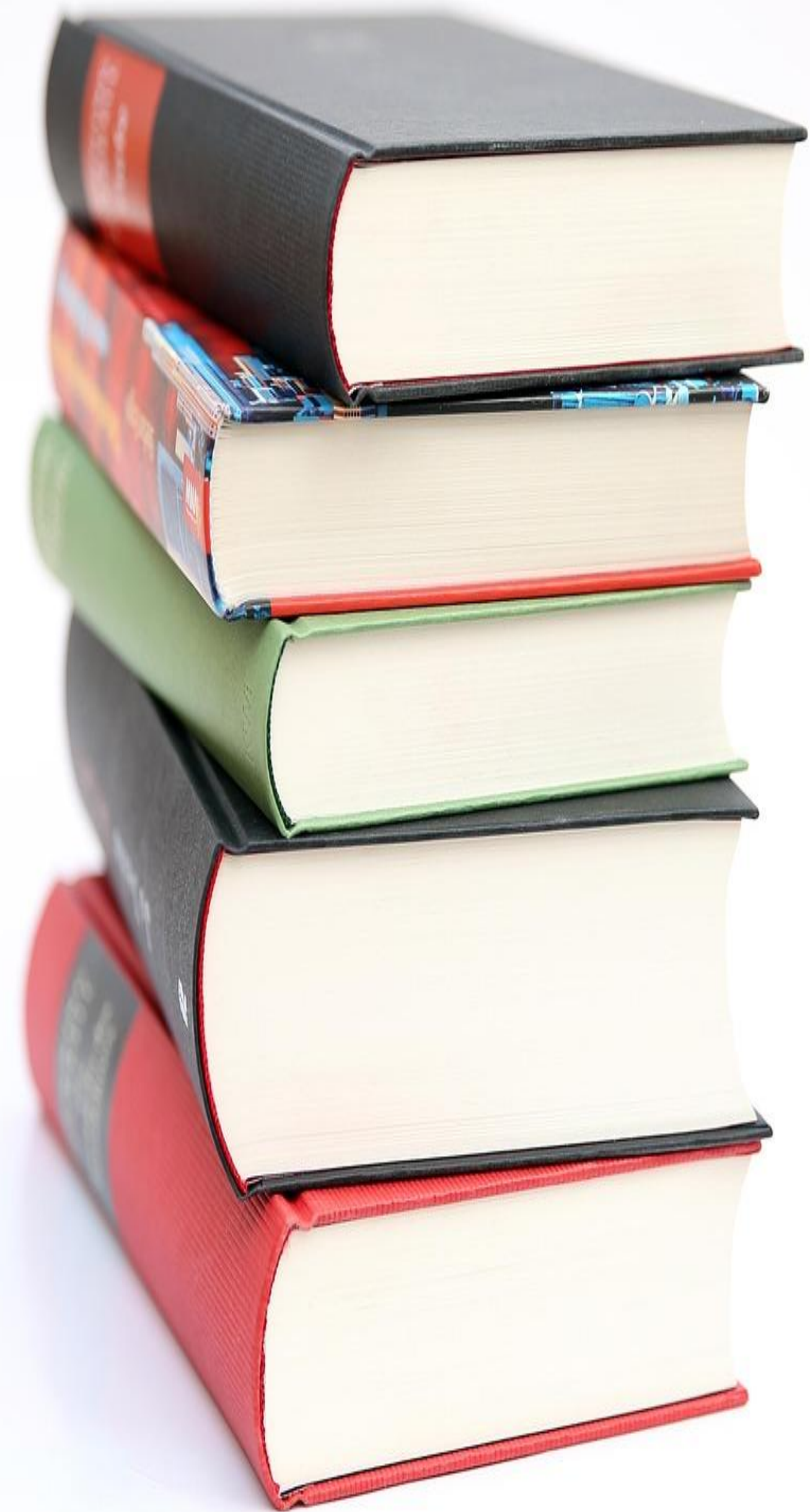
- LK BA: Laporan Keuangan BA 15
- LK BUN: Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
- LKPP: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
- WDP: Wajar Dengan Pengecualian
- WTP: Wajar Tanpa Pengecualian
- DPP: Dengan Paragraf Penjelasan



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

djppr

Informasi Lainnya



Update Peraturan Terkait Hibah

NO	PERATURAN	URAIAN
1	PMK Nomor 56 Tahun 2024	Pemberian Dukungan Dalam Rangka Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah Untuk Mendanai Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024
2	PMK Nomor 80 Tahun 2024	Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
3	PMK Nomor 109 Tahun 2024	Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah dari Luar Negeri
4	PMK Nomor 27 Tahun 2025	Mekanisme Penggantian Pajak Pertambahan Nilai dan Biaya Lain-lain Pada Hibah Rumah Sakit Kardiologi Emirat-Indonesia
5	(Dalam Proses Harmonisasi RPKM)	Ketentuan dan Prosedur Register Hibah Bagi Satker BLU



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



© 2024

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung Frans Seda

Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta

Tel. 021-3864778; Fax. 021-3843712

www.djppr.kemenkeu.go.id

